

TINJAUAN PUSTAKA

AL-Quran

BUKU

Adjie, Habib. 2009. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama.

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2014).

Dr. Habib Adji, SH.M.Hum, “*Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*”, (Bandung : PT Refika Aditama), hal 35-36

Fathonah, Ricka Auliaty, S.H. 2020. Tesis: “*Kehati-Hatian Notaris Terhadap Kebenaran Identitas Dan Tanda Tangan Penghadap Kaitannya Dengan Pembuatan Akta*”, Surabaya: Unair.

Garnasih, Yenti. 2016. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.

H.R, Ridwan. Dalam Rusdianto Sesung Et Al. 2017. *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*, Surabaya: R.A.De.Rozarie.

Husein, Yunus. 2007. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Jakarta, Books Terrace & Library.

Kelsen, Hans. 2006. *Teori Hukum Murni* terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, Bandung.

Kriekhoff, Valerine J.L. 2007. *Tanggung Jawab Profesi*, (Akarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang*”, Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka.
- Rahardiman, Buchari. 2008. *Kesalahan Dan Pertanggungjawaban Hukum Profesi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sinamo, Nomensen. 2014. *Filsafat Hukum, Dilengkapi Dengan Materi Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pt. Permata Aksara.
- Soekanto, Soerjunctono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijuncto. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri Cetakan 4*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tobing, G.H.S Lumban. 1998. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Wijayanto, Ridwan Zachrie. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia – Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Winanmo, Nur Basuki. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Wiyono. R., 2014. “Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Cet Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yanuar, Muh. Afdal. 2021. “*Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*”, Malang: Setara Press.

ARTIKEL/JURNAL/BULETIN

Afifah, Kunni. *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 2, Januari 2017.

Amalia, Renata. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam*, Aljinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 2 No. 2, Desember 2016.

Amalia, Rizky. Musakkir Musakkir, Syamsuddin Muchtar, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 24, No. 1, Mei 2001.

Ansori, Gatot Subroto, *Peran Ppatk Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Uniira Lau Jurnal Vol. 1 No. 1 Oktober 2022.

Ansori, Gatot Subroto. *Peran Ppatk Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Uniira Lau Jurnal Vol. 1 No. 1 Oktober 2022.

Astuti, Dessy Dwi. Nabitatus Sa'adah. *Pelimpahan Kewenangan Pada Lembaga Negara*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1, Nomor 1, Tahun 2019.

Aziza, Qonitah Annur. Ferina Yola Damayanti, Indrawati, "Kewajiban Notaris Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Ham tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris", Notaire Vol 5 No. 2, Juni 2022.

Aziza, Qonitah Annur. Ferina Yola Damayanti, Indrawati. *Kewajiban Notaris Dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Ham tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris*, Jurnal Notaire, Vol. 5 No. 2, Juni 2022.

- B, Mochamad Syafrizal. S.H. M.Kn, *Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Jurnal Unisba Blitar.
- Batubara, Sonya Airini S.H.,M.H. 2019. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Medan)*, Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 18 No. 2.
- Buletin Statistik - Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) Edisi serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM), Edisi Maret 2023, Vol. 11 No. 3.
- Derika, Dea. *Fungsi Notaris Dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan Dengan Asas Kehati-Hatian*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 2.
- Dhaneswara, Aganita. *Keterlibatan Notaris Dalam Pemberantasan Money Laundering Berdasarkan Pp No. 43 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Asas Kerahasiaan Terbatas*, Lex Renaissance Nomor 1 Vol. 5, Januari 2020,
- Gaol, Selamat Lumban. *Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 8 No. 2, Maret 2018.
- Ibrahim, Muhammad Raditya Pratama. Amad Sudiro. *Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51 No. 2, April 2022.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pp No. 43 Tahun 2015, Ln No. 148 Tahun 2015, Tln No. 5709, Penjelasan Umum.
- Ismail, Yudhia, SH. M.HUM, Achmad Rizki Sa’roni, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasar Modal Menurut Undang-*

Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Edisi Desember 2020.

Jp, Oddy Marsa. *Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi Pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung)*, Jurnal Cepalo Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2019.

Lasmadi, Suhari. Elly Sudarti, “*Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Vol. 5, No. 2, (April 2021)

Maharani, Adella Tiara, S.H., Adjie. 2021. Tesis “*Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Terkait Ketidaccakapan Penghadap Setelah Penandatanganan Akta*, Yogyakarta: UII.

Muliana, Syarwan Dan Rizki Anla Pater. *Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor Terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Aplikasi Gathering Reports And Information Processing System (Grips) Di Kabupaten Rokan Hulu*, Junctournal Of Jurudische Analitse, Vol 1 Nomor 2, November 2022.

Natasurya, Iman Muhammad. 2019. *Jurnal Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Yang Berindikasi Tindak Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas.

Nico. 2003. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation And Studies Of Business Law (CDSBL), Yogyakarta.

Norman, Mutia Karina. *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (Pmpj) Bagi Notaris Dalam Rangka MutualnEvaluation Review (Mer) Financial Action Task Force (Fatf) Terhadap Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 1 Januari 2023.

- Nugraha, Surya Adi. 2021. Tesis “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Tindak Pidana Pencucian Uang”, Malang: Unisma.
- Pusporeni, Annisa Septia. Fifiana Wisnaeni. 2023. “*Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris*”, NOTARIUS, Volume 16 Nomor 2.
- Purwaningsih, Endang. “ Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum”, Jurnal ADIL: Jurnal Hukum FH YARSI, Vol.2 No.3, 2011.
- Qindy, Fatria Hikmatiar Al. *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2, Juli-Desember 2023.
- Rahayuningsih, Toetik. *Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia*, Yuridika: Volume 28 No. 3, September-Desember 2013.
- Rahmadhani, Febri. 2020. *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Recital Review Vol 2 Nomor 2.
- Rahman, Fikri Ariesta, S.H. 2018. Tesis: “*Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap*”, Yogyakarta: UII.
- Rahman, Mokhammad Dafirul Fajar. 2014. *Kewenangan, Kewajiban Notaris Dan Calon Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, Brawijaya Law Student Junctournal.
- Rangkuti, Desela Sahra Annisa Dan Fully Handayani Ridwan. 2022. *Pelaksanaan Jabatan Notaris Yang Mendapat Kewenangan Dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.10 No. 5.

- Ridwan Arifin, Shafa Amalia Choirinnisa, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 12, No. 1 (2019)
- Rokhim, Abdul. *Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum FH Unisma Malang* Edisi Pebruari-Mei 2013
- Ruhaeni, Neni. *Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases Of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangankasaan*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 VOL. 21 JULI 2014.
- Safitra, Rendi. Nuzul Rahmayani & Anggun Lestari Suryamizon. *Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris*, *Sakato Lau Junctournal*, Vol. 1 No. 1, Januari 2023.
- Safitra. Rendi. Nuzul Rahmayani & Anggun Lestari Suryamizon, *Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris*, *Sakato Law Junctournal*, Vol. 1 No. 1, Januari 2023.
- Sari, I Gusti Agung Dhenita. I Gusti Ngurah Wairocana Dan Made Gde Subha Karma Resen. *Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik*, *Jurnal Ilmiah Acta Comunitas* Vol. 1, 2018.
- Setiadew, Kadek. I Made Hendra Wijaya, *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notarysebagai Akta Otentik*, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6 No 1, Februari 2020.
- Simanjuntak, Christin Novalia. Siti Hajati Hoesin. *Akibat Hukum Akta Jual Beli Yang Melanggar Pasal 40 Ayat 2 Huruf E Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt/2020)*, *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)*, Vol. 08, No. 01 Januari-Juni 2022.

Soegiyono. 2014. *Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lapan Kajian Kebijakan Dan Hukum Kedingrintaraan Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lapan Kajian Kebijakan dan Hukum Kedingrintaraan.*

Soemitro, Ronny Hanitijuncto. 1991. *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris*, Majalah Fakultas Hukum Undip “Masalah-Masalah Hukum” No. 9.

Standar Ketentuan Internal Tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lainnya, diakses pada tanggal 28 Oktober 2023, <https://www.ppatk.go.id>

Tobing, G.H.S. Lumban. *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris Dan Hubungannya Dengan KUHAP*, Media Notariat, Edisi No.22-23-24-25,1992.

Wahyuningrum, Kartika S., Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?. Refleksi Hukum – Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 4 Nomor 2, April 2020.

Wardojuncto, Mellysa Febriani, Didik Endro Purwoleksono. *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara*. Jurnal Hukum Legal Standing Vol. 2 No. 1, Maret 2018.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2021 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Surat Edaran KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Nomor AHU.UM.01.01- 1232, tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Identifikasi dan Komunikasi dengan Pengguna Jasa

Surat Edaran KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Nomor AHU.UM.01.01- 1232, tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Analisis Resiko dan Penggolongan Tingkat Resiko TPPU.

Surat Edaran KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Nomor AHU.UM.01.01- 1232, tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Pemeriksaan Dokumen, Pembaharuan Informasi dan Dokumen dan Pelaporan ke PPATK.

SUMBER LAINNYA

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2022, <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>, diakses tanggal 10 November 2023.

<https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2023.

Riyadi, Imam. Lima Tindakan Pencucian Uang dengan Nilai Fantastis sepanjang 2022”, Tempo.co Bicara Fakta, 20 Februari 2023. <https://grafis.tempo.co/read/3233/lima-tindakan-pencucian-uang-dengan-nilai-fantastis-sepanjang-2022>

Pelajari Dan Hindari Kejahatan Pencucian Uang. diakses pada tanggal 18 Oktober 2023.<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10470#:~:text=Pencucian%20uang%20secara%20sederhana%20merupakan,menjadi%20harta%20kekayaan%20yang%20sah>.

Budiono, Herlin. *Peran, Fungsi Dan Keberadaan Notaris Indonesia*, (<https://Notariat.Unpas.Ac.Id/Peran-Fungsi-Dan-Keberadaan-Notaris-Indonesia-1/>, Diakses Pada Tanggal 16 September 2023 Pukul 20.00 Wib)